

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



EDISI XXV
OKTOBER, NOVEMBER,
& DESEMBER 2018



**DEFORESTASI
REFORESTASI &
EKOKRASI**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Damai Sejahtera untuk Kita Semua
Om Swastiastu
Namo Buddhaya

Kehidupan berbangsa dan bernegara kita telah memasuki tahap yang cukup krusial. Dimensi kehidupan yang dilatarbelakangi oleh perubahan sosial budaya dalam dunia yang global telah membuat perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Implementasi bela negara sangat diperlukan saat ini karena bangsa Indonesia menantikan lahirnya sebuah metode yang tepat dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus menjaga jiwa dan raga seluruh rakyatnya.

Memetik pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo, Bahwa metode pelaksanaan program bela negara harus dilakukan dengan metode pentahelix dimana akademisi, pengusaha, pemerintah, komunitas dan media turut berperan dalam setiap aksi-aksi bela negara. Metode pentahelix diyakini dapat mendorong semua elemen bangsa agar bisa bersatu dalam melaksanakan bela negara.

Terjadinya degradasi sosial budaya di masyarakat, telah membuka peluang bagi banyaknya paham, yang tanpa disadari membuat ketahanan negara ini terganggu atau bahkan terancam. Kehidupan masyarakat kita begitu kuat tergerus oleh tekanan sosial - ekonomi yang tercipta secara akumulatif sejak krisis ekonomi melanda negara ini 20 tahun yang lalu.

Untuk itu, Majalah Catra sekali lagi mengajak semua pihak agar peduli terhadap kondisi bangsa ini dengan memberikan berkontribusi nyata. Belalah negara ini. Letakkan rasa bela negara di hati dan pikiran kita untuk selanjutnya diwujudkan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Redaksi

MAJALAH CATRA

Jl. Medan Merdeka Barat No.15

Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683

email: rodangmas@dkn.go.id

DAFTAR ISI

OPINI



- 4 KEDAULATAN EKONOMI DAN EKOLOGI HARUS SEJALAN



- 6 CARA AMPUH ATASI ANAK DARI PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME

TAJUK UTAMA



- 9 DEFORESTASI, REFORESTASI DAN EKOKRASI

KEBIJAKAN PEMERINTAH



- 14 INPRES NOMOR 7 TAHUN 2018 UNTUK UPAYA BELA NEGARA YANG LEBIH TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF, DAN TERSTANDARDISASI

INFO KITA



- 16 SESJEN WANTANNAS BERKUNJUNG KE PAPUA & PAPUA BARAT



- 18 RAPAT KERJA TERBATAS SETJEN WANTANNAS

TAHUKAH ANDA



- 20 PAMERAN ALUTSISTA BUKTI TNI DEKAT DENGAN RAKYAT

Inspirasi Bulan Ini

Jangan Menyerah Seperti “Gajah”

Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, dia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan apa yang sedang dilihatnya. Makhluk-makhluk besar itu sedang diikat cuma dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tak ada sangkar. Jelas sekali bahwa gajah dapat melepaskan diri dari ikatan mereka kapan saja. Tapi entah untuk beberapa alasan, mereka tak melakukannya.

Ia pun memperhatikan seorang pelatih di dekatnya dan bertanya terhadap pelatih hal yang demikian. “Mengapa binatang-binatang itu cuma berdiri di sana dan tak berusaha untuk melarikan diri?”

“Yah, dikala mereka masih benar-benar muda dan jauh lebih kecil, kami mengaplikasikan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan, pada usianya sekarang ini, ternyata tali itu telah cukup untuk menahan mereka. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tak dapat melepaskan diri. Mereka percaya bahwa tali yang digunakan untuk mengikat, dapat menahan mereka, sehingga mereka tak pernah mencoba untuk membebaskan diri,” itu penjelasan dari pelatih gajah.

Pria itu kagum. Hewan-hewan ini dapat saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tapi, mereka percaya bahwa mereka tak dapat melarikan diri, mereka terjebak tepat dimana mereka berada.

Filosofi gajah, betapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tak dapat menjalankan sesuatu, hanya karena kita pernah gagal sebelumnya.

Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Jangan menyerah. Teruslah berjuang di dalam hidup Anda.

DESI



KEDAULATAN EKONOMI & EKOLOGI HARUS SEJALAN

Oleh: Hulman Napitupulu, SH.

Pasca Deklarasi Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948, sebagai kelanjutannya, PBB kemudian melahirkan Deklarasi Stockholm pada tanggal 5 Juni 1972. Prinsip pertama Deklarasi Stockholm menyatakan: *"man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being."*

Deklarasi Stockholm tersebut dikenal sebagai Deklarasi Lingkungan Hidup 1972 atau "Deklarasi Hak-hak Asasi Lingkungan", karena merupakan kelanjutan dari perjuangan menghormati hak (asasi) semua makhluk Tuhan (termasuk manusia), juga merupakan keharusan/tuntutan zaman dan antisipasi lompatan teknologi yang sangat tinggi yang jika tidak hati-hati dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, lingkungan hidup (ekosistem) dipandang memiliki hak asasi yang wajib untuk dilindungi.

Dari sisi ini, setiap pembangunan dituntut tidak cukup hanya memerhatikan pilihan teknologi dan mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus dikaji dan dipertimbangkan juga aspek-aspek lingkungannya. Pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, sama dengan menghancurkan lingkungan dan pada akhirnya menghancurkan diri manusia sendiri.

Kegiatan perekonomian yang melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam

dan perlakuan-perlakuan yang merusak lingkungan dalam sebuah proses produksi, hanya menguntungkan segelintir orang (pengusaha), dan beberapa pekerja yang mendapat upah, dan negara memperoleh hanya bagian kecil hasilnya dalam bentuk pembayaran pajak. Tetapi, ribuan bahkan jutaan warga lainnya menderita kerugian akibat dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tidak terdapat keseimbangan dan keadilan antara kerusakan lingkungan yang terjadi serta akibatnya dalam jangka panjang dengan apa yang didapatkan/diperoleh sebagai hasil. Perlu diingat bahwa dalam perspektif lingkungan hidup, akibat yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan tidak mengenal batas-batas negara (bersifat transboundary). Artinya akibat-akibat yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan hidup, juga akan ditanggung oleh seluruh system yang berada di luar batas-batas suatu negara.

Beberapa contoh tentang ini dengan mudah dapat kita lihat, misalnya reaksi kemarahan negara tetangga yang terpapar asap tebal akibat dari pembakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Di dalam negeri, kita merasakan begitu banyak korban baik fisik (bahkan jiwa) maupun material akibat banjir bandang yang merupakan akibat jangka panjang dari maraknya pembalakan liar. Termasuk kerusakan lahan-lahan pertanian, peternakan dan sumber-sumber hayati lainnya akibat pembuangan limbah pabrik yang tidak bertanggungjawab.

Robert Eckersley, berpendapat bahwa perspektif jangka pendek dari para pengambil keputusan dalam sistem demokrasi liberal membuat pertimbangan lingkungan ditinggalkan dalam kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan. Karena itu, apabila demokrasi benar-benar ingin memasukkan pertimbangan lingkungan, ia harus memastikan bahwa musyawarah (dan bukan kompetisi) yang menjadi penentu dalam struktur ataupun proses pengambilan keputusan dalam berdemokrasi. Konsep ekokrasi harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara (politik hukum) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka perlu dijabarkan dalam *green constitution*, *green legislation* serta *green budgeting*.

Jika dikaitkan dengan Pasal 33 UU Dasar RI 1945:

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jelas menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Maka perekonomian yang tidak berwawasan lingkungan, adalah suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi, termasuk dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi, perlu adanya pengakuan atas alam dan lingkungan serta hal-hal yang terkandung di dalamnya. Juga mempertimbangkan akan keterbatasan daya dukung lingkungan serta pemahaman tentang *sustainability ecology* agar manusia tidak melakukan tindakan yang eksploitatif dan menghancurkan lingkungan serta alam ini dengan tanpa memprediksi konsekuensi dan dampak

negatifnya. Hal ini dikenal dengan pemahaman ekokrasi yang mempertimbangkan hubungan antara satu individu dengan yang lainnya dan juga dengan lingkungan mereka. Ekokrasi adalah perwujudan lain dari demokrasi yang tidak terbatas pada batasan wilayah negara semata-mata, tetapi ekokrasi bermakna lebih luas karena memiliki interkoneksi dengan bumi dan alam dalam arti luas. Ekokrasi adalah bentuk demokrasi yang tidak mencederai alam dan bumi serta membahayakan negara atau wilayah sekitar kita.

Dalam konsep ekokrasi itu, lingkungan alam – seperti halnya manusia – juga dianggap mempunyai otonomi dan keadulatanya sendiri.

Ilustrasi : Google



Penerapan sistem demokrasi kontemporer selalu diimbangi dan disertai oleh liberalisasi pasar dan pengurangan tanggungjawab negara dalam urusan bisnis dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap individu yang merdeka untuk menguasai dan menggunakan modal dalam mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Artinya, demokrasi harus dipandang juga turut bertanggung jawab atas terjadinya gelombang kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem dunia dewasa ini. Meskipun demokrasi itu sendiri tentu tidak perlu dimusuhi, akan tetapi perkembangannya di masa depan harus lebih dikendalikan oleh hukum dengan diimbangi oleh konsep baru yang dinamakan ekokrasi.

Dalam konsep ekokrasi itu, lingkungan alam – seperti halnya manusia – juga dianggap mempunyai otonomi dan keadulatanya sendiri. Jika dalam demokrasi setiap manusia yang disebut rakyat dianggap merupakan pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, maka lingkungan alam juga dipandang mempunyai hak asasinya sendiri dan memegang kedaulatannya sendiri seperti manusia. ****



CARA AMPUH ATASI ANAK DARI PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME

Oleh: Jumari Haryadi

Kehadiran paham radikalisme dan terorisme kita waspadai. Keduanya mempunyai dampak buruk terhadap masyarakat, seperti menimbulkan rasa takut, permusuhan, kebencian, dan trauma yang mendalam. Oleh sebab itu kita sebagai bangsa harus mencegah agar paham ini bisa diminimalisir atau kalau memungkinkan dihapuskan dari bumi Indonesia.

Pengertian radikalisme menurut <https://kbbi.kemdikbud.go.id> adalah: 1 paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2 paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan; 3 sikap ekstrem dalam aliran politik. Sementara itu pengertian terorisme adalah: penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror.

Jelas sekali menurut pengertian di atas bahwa paham radikalisme dan terorisme merupakan hantu menakutkan yang harus diberantas. Sudah banyak kejadian yang berkaitan dengan paham ini sudah meresahkan rakyat Indonesia, sehingga meninggalkan trauma mendalam bagi korbannya.

Mungkin masih jelas dalam ingatan kita peristiwa kekerasan yang baru-baru ini menimpa Haringga Sirila — salah satu suporter Persija — di area parkir Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, pada Minggu, 23 September 2018.

Haringga tewas secara mengenaskan dikeroyok para bobotoh — *sebutan suporter Persib*. Kejadian tersebut sempat viral karena ada rekaman video *handphone* yang di *upload* ke media sosial. Suatu hal yang membuat hati kita miris, dalam video tersebut terlihat ada seorang anak dibawah umur yang tega ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap korban.

Kejadian serupa juga pernah menimpa Banu Rusman (17) — seorang suporter Persita Tangerang — yang tewas mengenaskan akibat bentrokan setelah menyaksikan tim kesayangannya melawan PSMS Medan di Cibinong, Bogor, pada Rabu, 11 Oktober 2017 silam (sumber <https://news.detik.com>, edisi Jumat, 13/10/2017).

Kedua kasus di atas merupakan contoh bahwa tindakan kekerasan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Pertandingan sepak bola yang seharusnya menjadi ajang hiburan dan adu keterampilan dalam berolahraga justru berubah menjadi malapetaka. Semua ini terjadi akibat fanatisme sempit yang merasuk dalam pikiran para penonton yang nota bene para remaja.

Sementara itu kasus terorisme juga sudah mulai merebak di Indonesia. Banyak sekali ragam teror yang terjadi, baik yang dialami oleh sejumlah orang secara individu maupun yang dialami masyarakat secara umum. Kita bisa mengambil contoh kasus teror yang pernah terjadi selama kurun waktu tahun 2018 ini di Indonesia.

Berdasarkan info yang dikutip dari situs

<https://www.idntimes.com> (edisi 01/05/2018), setidaknya terdapat beberapa kasus penting yang sempat menghebohkan yaitu 1) teror di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat; dan 2) bom di tiga gereja di Surabaya; 3 bom di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo; dan 4 bom di Polrestabes Surabaya. Kasus teror tersebut bukan saja meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga korban, tapi juga bagi masyarakat umum.

PENYEBAB RADIKALISME DAN RADIKALISME

Paham radikalisme dan terorisme dalam diri seseorang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang membentuk pola pikir seseorang. Lingkungan itu bisa datang dari dalam seperti keluarga atau dari luar, seperti misalnya berasal dari kelompok atau organisasi yang diikutinya.

Hal ini bisa terjadi karena orang yang mengikuti paham tersebut biasanya termasuk orang yang wawasannya sempit dan memiliki sifat patuh terhadap orang yang membinanya. Sifat patuh yang membabi buta ini membuatnya bisa terperangkap dalam ajaran sesat yang membuatnya sulit keluar dari kelompoknya.

Menurut Kepala Pusat Penelitian Politik, Adriana Elizabeth, seperti dikutip dari situs <https://nasional.tempo.co> (edisi Selasa, 20/02/2018), setidaknya ada beberapa alasan mengapa paham radikalisme bisa berkembang di Indonesia, diantaranya adalah pertama, untuk kepentingan personal, bisa menyangkut urusan ideologi maupun finansial. Kedua, karena ada propaganda politik yang menarik, seperti pemberian fasilitas pelatihan dan transportasi. Ketiga, pemahaman soal penyucian diri dan keempat etika para elit politik yang buruk. Hal ini menyebabkan

publik menjadi apatis terhadap demokrasi dan menjadikan radikalisme sebagai jalan alternatif.

Sementara itu menurut REXI, seperti dikutip dari situs <http://tribrataneews.kepri.polri.go.id> (edisi 26/02/2018), ada lima faktor pendorong gerakan radikalisme di Indonesia yaitu Pertama, faktor-faktor sosial-politik; Kedua, faktor emosi keagamaan; Ketiga, faktor kultural; Keempat, faktor ideologis anti westernisme, dan; Kelima, faktor kebijakan pemerintah.

Di samping itu, faktor media massa (pers) Barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam. Propaganda-propaganda lewat pers memang memiliki kekuatan dahsyat dan sangat sulit untuk ditangkis, sehingga sebagian “ekstrim” yaitu perilaku radikal sebagai reaksi atas apa yang ditimpakan kepada komunitas Muslim.

CARA MENANGKAL PAHAM RADIKALISME

Cara menangkali paham radikalisme dan terorisme itu memang tidak mudah. Namun, kalau kita mau mencobanya, tidak ada yang mustahil dilakukan. Semua harus mau memulainya dari dalam keluarga sendiri, kemudian sekolah. Tentu saja pendidikan dalam keluarga memegang peranan penting. Sebab, masuknya paham radikalisme ini di antaranya karena tidak adanya ilmu dan iman yang mampu membentengi pelaku, sehingga paham itu dengan mudah dapat masuk dan memengaruhinya.

Cara ampuh yang wajib kita lakukan adalah melakukan pencegahan dengan membentengi anak-anak sejak usia dini. Mereka yang masih polos harus diberi pemahaman yang benar tentang



kehidupan bermasyarakat. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh secara eksklusif. Mereka harus memiliki rasa kasih sayang terhadap orang lain dan bisa menghargai berbagai perbedaan.

CARA MENANGKAL PAHAM RADISKALISME DAN TERORISME

1. Mengajarkan anak rasa kasih sayang dan melarang mereka melakukan tindakan kekerasan, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat;
2. Guru di sekolah harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jangan sampai ada anak yang mem-*bully* temannya sendiri, apapun alasannya;
3. Jika ada anak yang ingin protes terhadap kebijakan di sekolahnya, maka mereka harus diajarkan cara mengungkapkannya dengan sanun dan bahasa yang sopan;
4. Jika ada pertandingan olah raga, anak-anak diajarkan untuk sportif. Apabila kalah dalam pertandingan, mereka harus belajar untuk bisa menerima kekalahan itu dengan sportif dan menghargai pemenangnya, serta tidak menjadikan lawannya sebagai musuh;
5. Memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak. Mereka harus ditekankan untuk bertindak baik dan mencintai sesama manusia, apapun agamanya;
6. Memberikan pemahaman kepada anak tentang betapa bahayanya gerakan radikalisme. Berikan contoh-contoh sederhana yang mudah dipahami, sehingga terekam kuat dalam otak bawah sadarnya;
7. Memberikan kesempatan kepada anak untuk membicarakan soal SARA dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dan;
8. Mengajarkan anak-anak tentang kebhinekaan dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mempunyai slogan "**Bhinneka Tunggal Ika**".



DEFORESTASI REFORESTASI & EKOKRASI

Oleh : Ir. Muhammad Iqbal, M.Sc.

Secara hakiki, Tuhan menciptakan alam khususnya bumi sebagai tempat kehidupan makhluk hidup (termasuk manusia) berdasarkan prinsip keseimbangan, baik dari sudut pandang tempat maupun dimensi waktu. Apabila keseimbangan tersebut terusik, maka terjadilah ketimpangan yang pada gilirannya dapat menimbulkan bencana.

Kebanyakan manusia baru menyadari setelah munculnya suatu bencana dan boleh dikatakan sedikit yang mengantisipasi sebelum terjadinya bencana. Dalam hal ini termasuk fenomena bencana alam yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Salah satu penyebab terjadinya bencana alam adalah karena terganggunya keseimbangan ekosistem hutan. Hal tersebut mengingat hutan memiliki beberapa fungsi, terutama fungsi klimatologis (menyesuaikan iklim), fungsi hidrologis (mengatur tata air), dan fungsi orologis (mencegah erosi).

Ketiga fungsi tersebut secara natural dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Oleh karena itu, penebangan hutan (deforestasi) perlu direhabilitasi

dengan penghutanan kembali (reforestasi) agar eksistensi hutan dapat berfungsi seperti sedia kala. Reforestasi seyogianya tidak hanya terkait dengan deforestasi semata, tetapi sekaligus juga dalam rangka menjaga kedaulatan lingkungan (ekokrasi).

FENOMENA DEFORESTASI

Berdasarkan data dari *World Development Indicators* (World Bank, 2018), Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia, setelah Brazil dan Kongo. Namun luas hutan tersebut terus menurun dari tahun ke tahun.

Selama lebih dari dua dekade terakhir (1990-2105), luas hutan Indonesia berkurang rata-rata 1.101.400 hektare per tahun yaitu dari 118.545.000 hektare (1990) menjadi 91.010.000 hektare (2015), atau menurun sekitar 1,05 persen per tahun. Penyebab utama dari penurunan luas hutan adalah karena deforestasi, baik terencana maupun tidak terencana.

Secara ekstrim, deforestasi adalah proses penghilangan hutan. Secara lebih bijak, deforestasi merupakan eksploitasi terhadap kawasan hutan yang telah menyebabkan berkurangnya tutupan hutan (perubahan hutan menjadi bukan hutan), sehingga menimbulkan konsekuensi lahan menjadi

kritis atau tidak berfungsi dengan baik sebagai media produksi.

Faktor utama penyebab terjadinya deforestasi adalah disebabkan (1) alih fungsi (konversi) dari lahan hutan menjadi lahan untuk penggunaan lain seperti pertanian, pemukiman, dan infrastruktur lainnya; (2) pembalakan liar (*illegal logging*); dan (3) kebakaran hutan.

Sedangkan Akibat langsung dari deforestasi antara lain: (1) hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*); (2) terganggunya siklus air; (3) timbulnya erosi; dan (4) hilangnya mata pencaharian (terutama masyarakat di sekitar hutan).

Selama kurun waktu 17 tahun terakhir (2001-2017), *Global Forest Watch* (2018) mencatat bahwa rata-rata luas deforestasi di Indonesia adalah 1,43 juta hektare per tahun, atau setara dengan penurunan 2,44 Gt (gigaton) emisi gas karbon dioksida (CO₂).

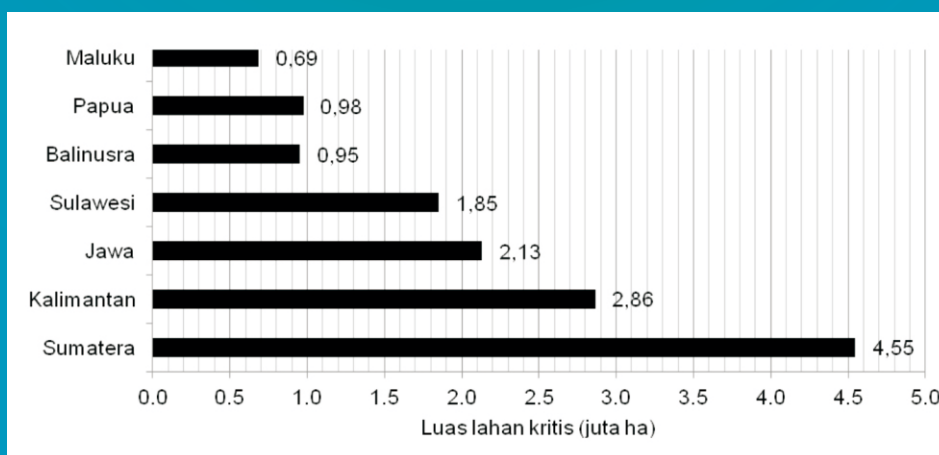
Sebagai ilustrasi, satu batang pohon menghasilkan 1,2 kilogram oksigen per hari, sedangkan satu orang manusia memerlukan 0,5 kilogram oksigen per hari.

Sehingga satu batang pohon dapat menunjang dua orang manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Jika satu batang pohon ditebang, maka dua orang warga (terutama di wilayah perkotaan) akan tercekik bernafas. Jadi, betapa pentingnya pohon dan betapa riskannya deforestasi.

Deforestasi paling luas adalah pada areal penggunaan lain dan kawasan hutan produksi. Bahkan deforestasi juga terjadi pada kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yang seyogianya tidak mengalami deforestasi. Menurut BPS (2017), rata-rata luas deforestasi (netto) di Indonesia terhitung sejak tahun 2010/2011 sampai dengan tahun 2014/2015 adalah 656.322 hektare dengan rincian seperti tertera pada tabel berikut:

NO.	KLASIFIKASI	LUAS DEFORESTASI (Ha)
1.	Hutan konservasi dan kawasan suaka/pelestarian alam	39.647
2.	Hutan lindung	47.143
3.	Hutan produksi terbatas	69.814
4.	Hutan produksi	219.744
5.	Hutan produksi konservasi	49.721
6.	Areal penggunaan lain	230.253

Deforestasi telah menyebabkan timbulnya lahan kritis, baik termasuk kategori kritis maupun tergolong klasifikasi sangat kritis. Terhitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 total lahan kritis di Indonesia berkurang dari 29.916.000 hektare menjadi 24.197.000 hektare, atau rata-rata mengalami penurunan sekitar 6,70 persen per tahun. Sebagian besar (81,03%) lahan tersebut termasuk kategori kritis dan sisanya (18,97%) tergolong klasifikasi sangat kritis. Terakhir, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2018), luas lahan kritis di Indonesia turun drastis menjadi 14 juta hektar. Rinciannya dapat diperhatikan pada grafik berikut:



IMPLEMENTASI REFORESTASI

Reforestasi adalah penghutanan kembali, atau upaya pembentukan kembali tutupan hutan tipe apa saja pada lahan yang sudah bukan merupakan hutan lagi. Secara awam, terminologi reforestasi boleh dikatakan relatif baru, mengingat sebelumnya ada istilah reboisasi dan penghijauan yang sudah cukup populer di kalangan masyarakat.

Reboisasi yaitu upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Sementara itu, penghijauan merupakan upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.

Untuk mengatasi deforestasi dan lahan kritis di Indonesia, pemerintah telah melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang sekaligus merupakan wujud dari reforestasi. Untuk tahun 2007 hingga tahun 2017, kegiatan RHL meliputi: (1) peta perizinan; (2) peta TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); dan (3) peta PIAPS (Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial).

Untuk tahun 2019 direncanakan kegiatan prioritas nasional RHL kritis secara vegetatif (226.000 ha), rehabilitasi hutan bakau/*mangrove* (1.000 ha), dan rehabilitasi melalui hibah luar negeri/*forest investment program* (3.000 ha) dengan total anggaran Rp 3,41 triliun. Kegiatannya meliputi 15 DAS (Daerah Aliran Sungai), 65 waduk, dan lokasi rawan bencana di 18 provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng,

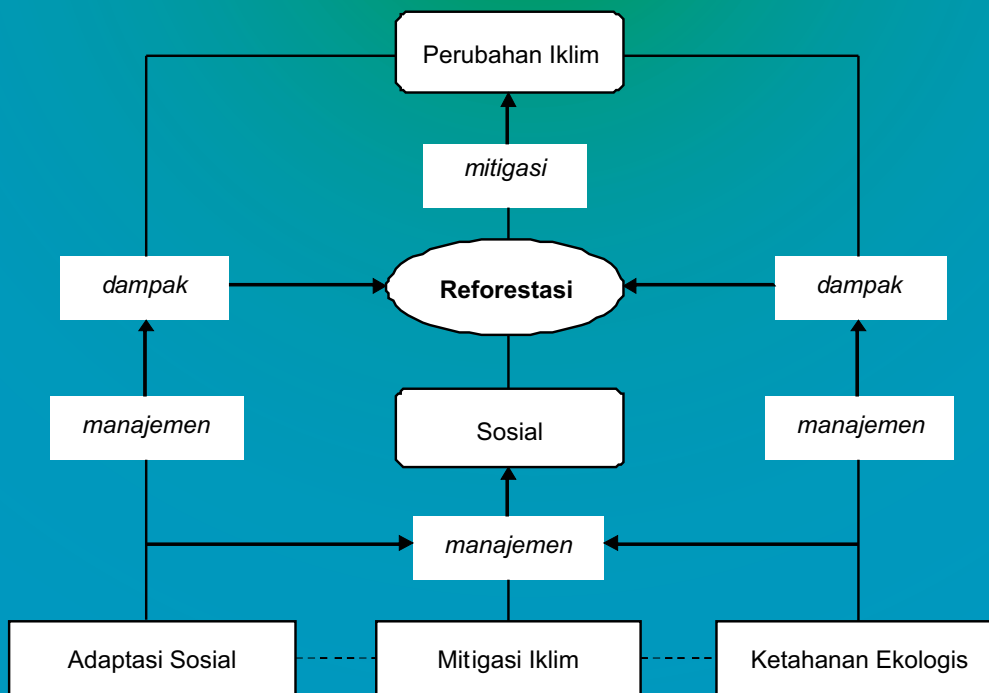
Jatim, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Bali, NTB, NTT, Sulsel, Gorontalo, dan Maluku).

Sebelumnya hutan memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan secara alami. Akan tetapi, prosesnya memakan waktu dan lebih lambat dibandingkan upaya tindakan manusia melalui reforestasi. Reforestasi tidak hanya dalam rangka penghutanan kembali, tetapi sekalian juga untuk tujuan konservasi dan kegiatan produksi hasil hutan.

Substansi reforestasi paling tidak berkaitan dengan empat kegiatan kunci berikut yaitu:

1. Restorasi berupa proses pemulihan suatu ekosistem ke keadaan seperti semula sebelum terjadinya kerusakan dalam ekosistem tersebut;
2. Rehabilitasi dalam bentuk tindakan mengembalikan kondisi sesuatu yang rusak ke keadaan yang lebih baik seperti sebelumnya;
3. Remediasi yaitu perbaikan atau membuat kondisi ekosistem menjadi baik kembali, dimana proses penekanannya lebih kepada upaya yang dilakukan dibandingkan pencapaian akhirnya;
4. Reklamasi atau proses untuk mengondisikan suatu lahan agar cocok untuk ditanami.

Mengacu pada konsep *Center for International Forestry Research* (CIFOR, 2015), implementasi reforestasi paling tidak meliputi tiga unsur ketatalaksanaan (*management*), yaitu adaptasi sosial (*societal adaptation*), mitigasi atau pengurangan risiko iklim (*climate mitigation*), dan ketahanan ekologis (*ecological resilience*) yang secara keseluruhan memiliki keterkaitan dengan dampak perubahan iklim. Lengkapnya dapat diamati pada diagram berikut ini:



Selain dari upaya di atas, implementasi reforestasi seyogianya juga dengan memanfaatkan jenis tanaman produktif dan langka serta ramah lingkungan yang sekaligus mampu memberikan insentif dan mendatangkan keuntungan secara berkelanjutan.

Patut dipertimbangkan bahwa introduksi tanaman rempah-rempah merupakan langkah strategis dalam rangka mengembalikan sejarah kejayaan jenis tanaman ikon Indonesia. Di atas semua itu, upaya reforestasi harus dilakukan secara holistik dan komprehensif seraya mengupayakan kedaulatan lingkungan (ekokrasi).

democracy.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam salah satu tulisannya tentang “Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi (2016)” mengemukakan bahwa dalam demokrasi telah terjadi apa yang dinamakan sebagai *anthropocentrism* atau penempatan kehidupan yang terpusat pada diri manusia. Dengan alasan kebebasan sebagai kekeliruan interpretasi demokrasi, manusia dapat berbuat secara tidak kendali dalam mengeksploitasi lingkungan (termasuk hutan) tanpa memikirkan dampak kerusakan yang berujung bencana yang



Setjen Wantannas dalam Rapat Koordinasi bersama K/L terkait membahas reforestasi dan ekokrasi

WACANA EKOKRASI

Istilah ekokrasi (kedaulatan lingkungan) masih belum mengemuka secara luas dibandingkan dengan istilah-istilah lain misalnya teokrasi (kedaulatan Tuhan) dan okokrasi (kedaulatan tunggal). Apalagi dengan istilah demokrasi (kedaulatan rakyat) yang cukup hingar bingar dibicarakan orang khususnya di tengah-tengah dinamika suasana politik yang sejatinya belum tentu semua orang memahami hakikat substansinya.

Melalui demokrasi, manusia dapat merasakan kebebasan tetapi jika tidak terkontrol maka dampaknya bisa menimbulkan kesewenang-wenangan atau apa yang sering dikenal dengan ungkapan “demokrasi kebablasan”. Bahkan ada yang memelesetkan *democracy* menjadi istilah yang tidak umum tetapi mengandung satire, yaitu

ditimbulkannya.

Sejatinya lingkungan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang saling berhubungan dan ketergantungan satu sama lain, namun selayaknya juga memiliki kedaulatan atau dikenal dengan istilah ekokrasi (kedaulatan lingkungan). Tujuannya agar lingkungan sebagai penyangga kehidupan manusia tetap eksis dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu perubahan paradigma berfikir dari pola *anthropocentrism* (ego sentris) ke perspektif *ecocentrism* (berorientasi lingkungan) dalam prinsip keseimbangan (*equilibrium*). Selayaknya dicatat bahwa untuk menjaga keseimbangan hubungan dan ketergantungan antara manusia dan lingkungannya, perlu sesuatu yang disebut sebagai *theocentrism* yang menempatkan Tuhan sebagai

pusat dari segala kehidupan manusia dan lingkungan. Inilah sesungguhnya keberadaan sejati ekokrasi sebagai bagian dari hubungan segitiga antara manusia-Tuhan-lingkungan yang harus dijaga dan dipraktikkan secara seimbang dan berkelanjutan, sehingga ekokrasi sendiri perlu diatur di bawah payung perundang-undangan.

Negara pertama yang telah mengatur ekokrasi (*rights of nature*) dalam konstitusinya adalah Ekuador. Dalam konstitusi yang disahkan pada tanggal 10 April 2008, hak asasi lingkungan disejajarkan dengan hak asasi manusia.

Konsepnya, *pachamama* atau alam, tempat kehidupan bersama tumbuh dan mengalami reproduksi, juga mempunyai hak asasinya sendiri, di samping hak asasi manusia. Setiap orang, masyarakat atau bangsa membutuhkan pengakuan akan hak-haknya atas alam di hadapan hukum dan pemerintahan. Setiap pelaksanaan atau penafsiran yang dilakukan sehubungan dengan hak-hak yang dimaksudkan tersebut haruslah sesuai dengan dan tunduk kepada prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam konstitusi.

Lantas, bagaimana dengan negara kita Indonesia? Pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “..... bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” secara implisit telah mengandung makna berwawasan lingkungan.

Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pasal 1 ayat (2) yang sudah menyatakan bahwa “..... perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Namun implementasi nyata konsep ekokrasi seyogianya dapat dipertimbangkan dalam mendukung kedua perundang-undangan tersebut agar lebih signifikan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan.

Fenomena deforestasi dan implementasi reforestasi akan terasa lebih pas jika dikaitkan dengan wacana ekokrasi. Artinya, baik deforestasi maupun reforestasi dapat dikontrol dengan baik karena kedua-duanya berada dalam satu koridor kedaulatan lingkungan (ekokrasi).

Dalam hal ini, masyarakat dan lingkungan memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dihilangkan (*unaliable rights*) dan berlaku dengan sendirinya (*self-executing*) sebagai tanggung jawab pemerintah dan rakyat dalam menegakkannya.

Akhirnya, semua itu terpulang pada diri kita semua. Jangan sampai terjadi seperti kata pepatah bahwa “..... sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna (*it is no use crying over spilled milk*)”.

Konkretnya, selain menjaga hubungan vertikal dengan Yang Maha Kuasa (*hamblum minallah*) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*hablum minannas*), kita juga harus menjaga hubungan dengan alam (*hablum minal alam*) sebagai refleksi irisan hubungan vertikal dan horizontal tersebut.

Alam yang diciptakan Tuhan seyogianya dimanfaatkan secara bijaksana, bukan dieksploitasi secara berlebihan apalagi dengan kerakusan, agar tercipta keseimbangan kehidupan yang damai dan berkelanjutan. Manusia diamanahkan untuk menjadi penguasa (khalifah) agar memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatan bersama.****



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

green
constitution

Nuansa Hijau

Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ilustrasi : Google



INPRES NOMOR 7 TAHUN 2018 UNTUK UPAYA BELA NEGARA YANG LEBIH TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF DAN TERSTANDARDISASI

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Mengutip situs resmi Sekretariat Kabinet, Inpres ini bertujuan agar upaya bela negara lebih terstruktur, sistematis, masif, dan terstandardisasi.

Inpres ini ditujukan kepada: 1) Para menteri Kabinet Kerja; 2) Sekretaris Kabinet; 3) Jaksa Agung; 4) Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6) Kepala Badan Intelijen Negara; 7) Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8) Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 9) Para Gubernur; dan 10) Para Bupati/Wali Kota.

Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 yang terdiri tiga tahap, yaitu sosialisasi, internalisasi nilai dasar bela negara, dan aksi gerakan.

Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan pula agar dalam aksinya berpedoman pada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas). Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 setiap akhir tahun anggaran melalui dan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Setjen Wantannas.

Kepada para Menteri Koordinator, Presiden Jokowi meminta agar memfasilitasi Setjen Wantannas saat mengkoordinasi kementerian dan lembaga, serta mengevaluasi pelaksanaan aksi nasional bela negara. Sementara itu, kepada

Menteri Dalam Negeri, Presiden menginstruksikan agar mengkoordinir pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi bela negara. Kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Presiden meminta agar memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Sedangkan kepada Sekretaris Kabinet, menginstruksikan untuk mengawasi pelaksanaan Inpres ini.

Berdasarkan Inpres tersebut, Rencana Aksi Nasional (RAN) Bela Negara Tahun 2018-2019 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pos anggaran kementerian dan lembaga, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019, menurut Inpres ini, dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Inpres disebutkan bahwa, pelaksanaan RAN Bela Negara Tahun 2018-2019 dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam lampiran Inpres ditampilkan tabel Aksi, Penanggung Jawab, Instansi Terkait, dan Indikator Keberhasilan sesuai masing-masing tahap pelaksanaan RAN Bela Negara Tahun 2018-2019. Pada tahap pertama misalnya, ditampilkan Aksi Penyelenggaraan Rembuk Nasional Pembinaan Bela Negara dengan penanggung jawab Setjen Wantannas dan instansi terkait lainnya yakni seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,

dengan indikator dihadiri oleh seluruh pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setara. terkait lainnya yakni seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dengan indikator dihadiri oleh seluruh pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setara.

Selain itu juga ada aksi Penyelenggaraan Pelatihan Perancang Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Tahun 2018 dengan penanggung jawab Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dan keikutsertaan instansi terkait yakni seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, dengan indikator tersusunnya buku pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bela negara.

ancaman potensial yakni kerentanan kualitas hidup masyarakat dalam aspek kesehatan.

Sedangkan pada bidang geografi terdiri dari ancaman faktual yakni letak geografi Indonesia di kawasan cincin api Pasifik serta menurunnya kesadaran dan kewaspadaan bangsa terhadap posisi geostrategis Indonesia. Kemudian ancaman potensial yakni konflik warga dan friksi lintas batas negara.

Bela negara saat ini sangat dinamis dan jika dibandingkan dengan bela negara 20 tahun lalu, masih bicara soal invasi militer serta ancaman negara dengan negara. Tapi sekarang bentuk ancaman bukan hanya dari negara saja, tapi juga

Bela negara saat ini sangat dinamis dan jika dibandingkan dengan bela negara 20 tahun lalu, masih bicara soal invasi militer serta ancaman negara dengan negara. Tapi sekarang bentuk ancaman bukan hanya dari negara saja, tapi juga semakin kompleks.



Ilustrasi : Google

Sedangkan pada tahap internalisasi nilai-nilai dasar bela negara, rencana aksi yang disiapkan di antaranya adalah pelatihan/penataran kader bela negara. Penanggung jawab dalam tahap ini adalah Sesjen Wantannas yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Indikator keberhasilannya adalah terbentuknya kader-kader bela negara lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pada tahap ini juga terdapat sosialisasi dan diseminasi pembangunan kesadaran bela negara di kalangan perempuan, pemuda, pelajar, dan mahasiswa, dengan penanggung jawab Sesjen Wantannas dan para Menteri Koordinator. Indikator keberhasilannya adalah terbangunnya pemahaman tentang urgensi bela negara.

Sementara pada tahap ketiga, rencana aksi dibagi dalam beberapa klasifikasi. Mulai dari bidang demografi yang terdiri atas ancaman faktual yakni pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan persebaran penduduk yang tidak merata serta

semakin kompleks. Dan bentuknya bukan hanya militer saja, tetapi juga ekonomi, social, budaya. Hukum dan lain-lain. Sehingga kompleksitas ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan tai itu tidak hanya mewujud di satu sector saja, tetapi multidimensional.

RAN Bela Negara yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 ini merupakan salah satu langkah antisipasi pemerintah yang patut di apresiasi secara baik, ditengah begitu banyaknya gejolak di masyarakat yang tanpa disadari dapat membuat lunturnya nilai-nilai kebangsaan, pemerintah sudah memulai dengan langkah yang kongkrit, karena apapun itu, kita harus bisa menjaga dan merawat NKRI dan salah satu yang paling mungkin yaitu menumbuhkan rasa dan semangat bela negara yang diejawantahkan dalam seluruh bentuk kehidupan dan kegiatan kita sehari-hari sebagai warga bangsa. ****



SESJEN WANTANNAS BERKUNJUNG KE PAPUA & PAPUA BARAT

Oleh: Desi

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia. Dikedua wilayah tersebut diketahui memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah. Hal inilah yang menjadi perhatian Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo untuk berkunjung ke wilayah tersebut guna mempelajari potensi dan kendala yang terdapat di Provinsi ke-23 di Indonesia itu.

Sesjen Wantannas didampingi oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Laksda TNI Teguh Prihantono, S.Sos dan beberapa Pejabat Eselon II, direncanakan mengunjungi Papua dan Papua Barat dalam rangka Pengkajian Daerah (Kajida) mulai Senin (24/09/2018) hingga Kamis

(27/09/2018).

Adapun yang menjadi topik utama dari kegiatan tersebut adalah pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat yang saat ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Sebagaimana dikutip dari tribunnews.com, Presiden Joko Widodo mempunyai alasan sendiri terkait dengan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Hal ini disebabkan, Indonesia bukan hanya bernegara, berbisnis, atau berekonomi saja. Ditambah lagi, Indonesia bukan hanya Pulau Jawa saja. Di sini terlihat adanya ketimpangan infrastruktur barat, tengah, dan timur. Sungguh sangat mencolok dan perbedaannya sangat lebar sekali.

Mengacu pada permasalahan di atas,

Setjen Wantannas di bawah kepemimpinan Letjen TNI Doni Monardo melaksanakan Kajida di wilayah Jayapura, Manokwari dan Sorong untuk mengetahui sejauhmana koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan masyarakat dalam rangka penguatan SDM dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan potensi-potensi perkebunan, pertanian, peternakan dan budidaya perikanan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Perlu diketahui, saat ini pemerintah sedang fokus membangun Papua dan Papua Barat, khususnya pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk kelancaran dan kemudahan distribusi dan transportasi sandang dan pangan dan arus lalu lintas masyarakat, serta meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Tim Kajida Setjen Wantannas akan melaksanakan observasi ketiga wilayah tersebut melalui tatap muka, dan audiensi serta sosialisasi pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) melalui pengelolaan sumberdaya alam (emas hijau) dan potensi laut (emas biru). Namun, tidak menutup kemungkinan adanya masukan-masukan lainnya yang sangat terkait dengan kondisi ketahanan nasional di wilayah Papua dan Papua Barat dalam rangka membangun kesadaran tentang ketahanan nasional.

Selain diikuti oleh pejabat di lingkungan Setjen Wantannas, Kajida ini juga mengikutsertakan pejabat K/L lain seperti Dirjen PPMD Kemdes PDT Taufik Majid, Staf Ahli Dirjen Perikanan Tangkap, KKP Ir.Jainur Manurung, M.M, perwakilan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), dan beberapa pejabat yang berasal dari organisasi swasta.

Adapun lokasi-lokasi khusus yang menjadi target kunjungan serta pelaksanaan audiensi diantaranya Kantor Gubernur dan Forkopimda berikut jajarannya di Jayapura dan Manokwari, serta segenap Pemerintah Daerah di Sorong.****





Oleh : Desi/Yayat

Setjen Wantannas untuk yang kesekian kalinya menyelenggarakan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat, Selasa (18/09/2018). Pleno pembukaan Rakertas yang semula akan dibuka oleh Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo, kali ini diwakili oleh Deputy Bidang Sistem Nasional Mayjen TNI Aris Martono Haryadi.

Sesjen Wantannas dalam sambutan tertulisnya menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada para pakar dan narasumber yang selama tiga hari ke depan akan memberikan sumbang saran dan pemikiran kepada Setjen Wantannas dalam rangka penyusunan naskah atau kajian yang merupakan program dan produk prioritas dari Setjen Wantannas.

Selaku Sesjen Wantannas, sebagaimana disampaikan Desisnas, menaruh harapan besar pada kegiatan Rakertas ini, agar nantinya produk kajian yang telah melalui proses pembahasan dari beberapa tahapan mulai dari Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Rakertas, Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus), hingga Rapat Perumusan Kegiatan (Ramusmat) nantinya, memiliki bobot yang pantas dan nilai yang berkualitas untuk disampaikan kepada Ketua Dewan Ketahanan Nasional yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden RI.

Adapun kedelapan materi dari empat Kedeputan di lingkungan Setjen Wantannas yang

menjadi topik bahasan Rakertas sebagai berikut:

1. Kedeputan Sistem Nasional yang akan membahas tentang a) Antisipasi dan Solusi Imigrasi Perdagangan Konvensional ke *E-commerce* dalam rangka Memperkuat Ekonomi Berbasis Digital; dan b) Penataan Kebijakan Impor Guna Meningkatkan Perekonomian Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional;
2. Kedeputan Politik dan Strategi yang akan membahas tentang a) Percepatan Penataan Kembali DAS Ciliwung Guna Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional; dan b) Pengembangan Komoditi Kelapa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Ekonomi Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional;
3. Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan yang akan membahas tentang a) Optimalisasi Diplomasi Percepatan Penyelesaian Perbatasan Darat RI – Malaysia di Kalimantan Utara dalam rangka Ketahanan Nasional; dan b) Pengembangan Kerja Sama Indo – Pasifik untuk Mendukung Pencapaian Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia;
4. Kedeputan Pengembangan yang akan membahas tentang a) Akselerasi Pengembangan Budidaya Laut (Marikultur) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam rangka Ketahanan Nasional; dan

- b) Antisipasi dan Solusi Berakhirnya Masa Kontrak Perusahaan Migas Guna Menjaga Ketahanan Energi dalam rangka Ketahanan Nasional.

PENUTUPAN RAKERTAS

Rakertas resmi ditutup oleh Deputy Pengkajian dan Penginderaan (Dejiandra) Laksda TNI Teguh Prihantono S.Sos yang mewakili Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo, Kamis (20/09) di Ruang Rapat Nakula Lantai 6 Setjen Wantannas.

Dalam Keynote Speech yang dibacakan oleh Dejiandra, Doni Monardo yang pada saat itu menghadiri Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Kemenkeu RI mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari para peserta dan pakar yang bersedia hadir dalam Rakertas kali ini.

Pada pleno penutupan Rakertas kali ini dari delapan tema yang dibahas, hanya empat tema yang dipaparkan yaitu 1) Kelompok B1 Kedeputan Polstra yang mengusung tema Percepatan Penataan Kembali DAS Ciliwung Guna Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan

Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Ketahanan Nasional yang dipaparkan oleh Dr. Yayat Supriyatna Pakar Tata Ruang Universitas Trisakti; 2) Kelompok A-2 Kedeputan Sisnas mengusung tema Penataan Kebijakan Impor Guna Meningkatkan Perekonomian Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional yang dipaparkan oleh Haryo B. Rahmadi, SE, M.Si (Han) Pakar Bidang Ekonomi dan Pertahanan; 3) Kelompok D-1 Kedeputan Debang mengusung tema Akselerasi Pengembangan Budidaya Laut (Marikultur) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Dalam Rangka Ketahanan Nasional yang dipaparkan oleh Dr. Ir. Irzal Effendi, M.Si Ketua Program Studi Akuakultur – Marikultur; 4) Kelompok C-1 Kedeputan Dejiandra membahas tema Optimalisasi Diplomasi Percepatan Penyelesaian Perbatasan Darat RI – Malaysia Di Kalimantan Utara Dalam Rangka Ketahanan Nasional yang dipaparkan oleh Dr. Andi Amir.

Sementara itu bertindak sebagai moderator yakni Deputy Sisnas Mayjen TNI Aris Martono Hariyadi didampingi oleh Laksda TNI Teguh Prihantono yang bertindak sebagai penerima paparan. ****



Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Dr. Yayat Supriyatna, M.SP hadir sebagai narasumber dalam Rakertas



PAMERAN ALUTSISTA, BUKTI TNI DEKAT DENGAN RAKYAT

Oleh: Desi

Monumen Nasional (Monas) menjadi tempat perhelatan akbar Pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) oleh TNI dalam rangka menyambut HUT TNI ke-73. Tahun ini, acara ini berlangsung di silang Monas selama 3 hari mulai Kamis (27/09/2018) hingga Sabtu (29/09/2018).

Seperti dikutip dari Liputan6.com, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP, membuka Pameran Alutsista kemarin, Kamis (27/09). Menurut Panglima dalam sambutannya, pameran ini sengaja dibuka untuk mendekatkan TNI dengan rakyat. Apalagi dalam waktu dekat, Indonesia akan memperingati HUT TNI. Disamping itu, acara ini merupakan kesempatan TNI memamerkan alutsistanya yang canggih dan modern.

Ditegaskan pula oleh Panglima, pameran yang juga menampilkan kekuatan dari Korps Bhayangkara ini juga sebagai gambaran bahwa TNI dan Polri memiliki sinergitas yang kuat guna menciptakan kondisi negara yang aman dan damai. Berdasarkan pemantauan langsung, Pameran Alutsista kerap menjadi agenda TNI setiap tahunnya dengan mengambil lokasi yang berbeda, dan untuk

tahun ini, diselenggarakan di silang Monas, Jakarta Pusat.

TNI dengan tiga angkataannya yaitu AD, AL, dan AU memamerkan sejumlah alutistanya seperti Barracuda, Panzer V-150 Intai, Panzer V-150 AP, Panzer V-150 Commando, Panzer V-150 Canon, Tank Scorpion, Tank Stormer APC, Tank Stormer Komando, Tank Recovery, Microlight Trike, Atlas Firing Unit. Sudah Bisa dipastikan, perhelatan ini mendapat antusias dari masyarakat, bahkan banyak dari mereka yang menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk mengambil gambar ataupun ber-*selfie* ria.

Pameran Alutsista yang ditata dengan mengitari kawasan Monas, tidak hanya menampilkan alat-alat berat saja. Jika kita jelajahi sampai ke kawasan timur Monas, akan kita dapati panggung hiburan yang diisi oleh personel-personel TNI sebagai penyanyi dan pemain band. Hal ini membuktikan bahwa, ternyata, TNI bukan hanya dekat dengan rakyat. TNI juga dekat dengan seni. Dibalik fisik yang tegap, tersimpan suara merdu yang membahana, menambah semaraknya Pameran Alutsista. ****

YANG TERSISA DARI ASIAN GAMES 2018

Pagelaran Asian Games XVIII Jakarta-Palembang 2018 telah berakhir dua bulan yang lalu. Banyak momen dan kenangan serta peninggalan event tersebut yang masih terasa hingga saat ini. Indonesia patut bangga dengan penyelenggaraan kali ini, setidaknya ada beberapa sisi kesuksesan di perhelatan ini.

Yang pertama adalah sukses dari sisi penyelenggaraan. Meski hanya berstatus sebagai tuan rumah pengganti, setelah calon tuan rumah sebelumnya Vietnam mengundurkan diri, Indonesia bisa melakukan persiapan dengan baik. Pembangunan infrastruktur *venue*, wisma atlet, dan sarana penunjang lainnya bisa diselesaikan tepat waktu meskipun waktunya sangat terbatas. Indonesia juga mendapatkan nilai plus dari berbagai negara peserta Asian Games termasuk Komite Olimpiade

Asia terkait penyelenggaraan Asian Games 2018 kali ini. Tidak ada insiden memalukan selama perhelatan dan setiap pertandingan berjalan dengan lancar. Selain itu, kemeriahan pesta pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 juga turut menjadi perhatian dunia Internasional. Bahkan banyak negara peserta setuju agar Indonesia bisa menjadi salah satu kandidat tuan rumah Olimpiade 2032 nanti.

Indonesia juga sukses dalam keikutsertaan pada Asian Games 2018 ini. Tercatat kontingen Indonesia berhasil mengumpulkan total 31 medali emas dan bertengger di posisi 4 klasemen medali akhir. Ini merupakan pencapaian terbaik Indonesia selama keikutsertaan di ajang Asian Games. Padahal, pada ajang sebelumnya di Incheon tahun 2014 Indonesia hanya mengumpulkan 4 medali emas dan berada di urutan ke 17 klasemen raihan

medali.

Kesuksesan tersebut tidak lepas dari adanya cabang pencak silat yang ikut dipertandingkan dalam Asian Games kali ini yang menjadi tambang emas kontingen Indonesia. Selain itu, faktor tuan rumah juga ikut mendongkrak motivasi atlet Indonesia untuk tampil lebih baik dihadapan pendukungnya sendiri.

Bertanding di rumah sendiri juga membuat para atlet Indonesia mengenal arena lebih baik dibandingkan lawan-lawannya. Namun, diluar hal tersebut peningkatan prestasi atlet Indonesia sudah terlihat.

Sebelum cabang pencak silat dipertandingkan, Indonesia telah melampaui target perolehan medali yakni 16 emas serta masuk 10 besar. Cabang-cabang yang bukan menjadi andalan justru membuat kejutan seperti Tenis, Taekwondo, Wushu, Sepeda Gunung, Panjat Tebing, Dan Jetski.

Keterlibatan masyarakat dalam memeriahkan Asian Games 2018 juga nampak terlihat. Hampir seluruh *venue* pertandingan ramai oleh penonton. Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) bahkan menambah porsi bangku untuk umum dari total kapasitas *venue* menjadi 90%. Masyarakat tak cuma berbondong-bondong untuk menonton dan mendukung para atlet yang bertanding, namun juga ingin menikmati suasana Asian Games 2018 yang bersejarah.

Asian Games 2018 meninggalkan begitu banyak kesan, sudah semestinya kita bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan prestasi yang telah kita capai untuk event selanjutnya. Selain itu, berbagai *venue* yang baru dibangun maupun direnovasi hendaknya kita bisa pelihara agar tidak terbengkalai serta bisa meningkatkan prestasi atlet nasional.****



MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh: Desi

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2018 sebesar 9,82% dari total penduduk atau setara 25,95 juta orang. Angka ini menurun jika dibandingkan posisi September 2017 yang sebanyak 26,58 juta orang. Jika dilihat berdasarkan pulau, angka kemiskinan paling besar terdapat di wilayah Indonesia Timur yaitu Maluku dan Papua.

Pada wilayah Maluku dan Papua, menurut Kepala BPS sebagaimana dilansir dari detik.com, terdapat angka kemiskinan sebesar 21,20%. Sedangkan persentase kemiskinan di Pulau Jawa per Maret 2018 menurun menjadi 8,94% dari sebelumnya 9,38%. Begitu juga di Sumatera menjadi 10,39% dari 10,44%.

Untuk kondisi di Pulau Jawa, bisa jadi menurunnya angka kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

1. Bantuan Sosial dari Pemerintah Turun Tepat Waktu
Bantuan sosial yang dimaksud di sini adalah program pemerintah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Dana Desa, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Pengendalian Inflasi
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan angka kemiskinan terjadi karena terjaganya inflasi selama periode penelitian profil kemiskinan dari September 2017 ke Maret 2018 sebesar 1,92 persen. Tingginya angka inflasi ini membuat penambahan pendapatan masyarakat jadi tak berarti.
3. Tingginya Nilai Tukar Petani (NTP)
NTP merupakan indikator yang menentukan kesejahteraan petani dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dalam persentase.

PROFIL KEMISKINAN MARET

Berita Resmi Statistik No. 5



Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau



Sementara itu, menurut Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo, salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia adalah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Menurutnya, pencemaran sungai mempunyai andil yang besar dalam pengrusakan lingkungan. Sebagai contoh, Sungai Citarum. Sungai yang terpanjang dan terbesar di Jawa Barat ini telah berhasil menghitamkan prestasinya sebagai sungai terkotor di dunia sejak 10 tahun lalu. Julukan tersebut diperoleh dari Bank Dunia.

Menurut Doni Monardo dalam setiap paparannya pada Program Citarum Harum, racun yang ada di Sungai Citarum sangat tinggi, saking tingginya hingga mencapai 1000 kali lipat, dari batas aman air minum di Amerika. Namun, meski mendapat julukan sungai terkotor di dunia, Sungai Citarum tetap digunakan oleh sekitar 35 juta orang penduduk Jawa Barat. Ke-35 juta orang itu menggunakan air Sungai Citarum untuk irigasi, mencuci, mandi, bahkan dijadikan air minum.

Faktanya, Sekitar 50 tahun lalu, Sungai Citarum sangat bersih. Airnya bisa digunakan untuk mandi dan minum. Namun, semenjak ada pabrik, airnya mulai kotor dan baunya berubah. Saat ini, ada sekitar 2.000 pabrik di sekitar Sungai Citarum. Pabrik-pabrik itu membuang limbah sebanyak 340.000 ton setiap harinya. Belum lagi limbah-limbah yang berasal dari kotoran manusia dan hewan serta limbah medis yang seharusnya dimusnahkan dengan berbagai cara, malah dilarung ke sungai. Tak hanya itu, banyaknya warga yang membuang sampah ke sungai juga merupakan penyebab, kenapa Sungai Citarum berubah menjadi kotor dan bau.

Dampak dari semua ini adalah susahnya mendapatkan air yang bersih dan layak untuk dikonsumsi, sehingga masyarakat harus banyak mengeluarkan air untuk membeli air. Biota-biota penghuni sungai yang seyogyanya bisa menjadi sumber perekonomian, ikut tercemar. Penyakit yang ditimbulkan akibat pencemaran pun ikut menyerang. Mulai dari penyakit kelas ringan sampai penyakit kelas berat seperti kanker mengheinggapi masyarakat. Hal in tentu saja menambah berat beban hidup masyarakat yang sudah berpenghasilan pas-pasan.

Jika kita tarik benang merah, dapat diperkirakan sumber daya manusia di masa yang akan datang menjadi lemah dan tidak berkualitas. Padahal, Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Akibatnya, kemungkinan besar masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta tidak sejahtera. Apa kaitannya dengan penduduk DKI Jakarta? Karena sebanyak 80% dari penduduk DKI Jakarta menggunakan air yang berasal dari Sungai Citarum untuk dikonsumsi sehari-hari.

Oleh sebab itu, Doni Monardo tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. "Jadilah bagian dari warga negara yang peduli dengan lingkungan". Itu yang selalu diucapkannya.****

AN DI INDONESIA T 2018

7/07/Th. XXI, 16 Juli 2018

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia



lau



AN



BADAN PUSAT STATISTIK
<https://www.bps.go.id>

IKAN-IKAN LANGKA DI INDONESIA

Oleh: Yayat Ruhiat

Wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari lautan menyimpan berjuta biota laut seperti ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya yang menakjubkan. Namun, saat ini beberapa jenis ikan yang hidup di Indonesia ada diambang kepunahan bahkan sudah sangat sulit sekali dijumpai. Berikut ini ikan-ikan langka yang ada di Indonesia dengan status dilindungi.

1. IKAN PESUT MAHAKAM

Pesut mahakam yang memiliki nama latin *Orcaella brevirostris* adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang hampir punah karena berdasarkan data tahun 2007, populasi hewan tinggal 50 ekor saja dan menempati urutan tertinggi satwa Indonesia yang terancam punah. Secara taksonomi, pesut mahakam adalah subspesies dari pesut (Irrawaddy dolphin). Pesut mahakam hidup di sungai-sungai daerah tropis. Populasi satwa langka yang dilindungi undang-undang ini hanya terdapat pada tiga lokasi di dunia yakni Sungai Mahakam, Sungai Mekong, dan Sungai Irawady.



IKAN PESUT



IKAN RAJA LAUT

2. IKAN RAJA LAUT

Ikan raja laut yang memiliki nama latin *Coelacanth* merupakan salah satu jenis ikan purba yang diketahui hidup di perairan Pulau Manado Tua, Sulawesi Utara. *Coelacanth* sendiri memiliki 120 spesies berdasarkan hasil identifikasi fosil dan sudah dinyatakan punah pada akhir zaman cretaceous (65 juta tahun silam). Hingga akhirnya pada tahun 1938 ditemukan *Coleacanth* yang masih hidup tersangkut jaring hiu di Chalumna, di kepulauan Komoro Afrika Selatan yang merupakan spesies "*Latimeria Chalumnae*". Pada 1998, seekor coelacanth spesies baru "*Latimeria menadoensis*" tertangkap jaring nelayan di perairan Pulau Manado Tua, Sulawesi Utara. Masyarakat Sulawesi menyebutnya dengan "Ikan Raja Laut".

3. IKAN MATAHARI //(Mola mola/Mola ramsayi)

Mola-mola yang populer dengan nama “Sun Fish” (Ikan Matahari) merupakan salah satu ikan langka yang hidup di iklim tropis dan subtropis. Ikan Mola-mola dewasa dapat mencapai panjang 1 meter dengan berat 1-2 ton. Ikan Mola-mola hampir tidak memiliki sirip ekor, namun memiliki clavus, yang merupakan sambungan sirip punggung dan sirip perut. Mola-mola dapat dijumpai sepanjang bulan Juli-September di Lembongan, Bali.



4. HIU SENTANI

Hiu Sentani yang sering disebut “*Largetooth Jawfish*” oleh orang barat adalah nama lain dari jenis Hiu Gergaji yang hidup di danau Sentani, Papua. Saat ini keberadaan hiu jenis tersebut semakin jarang ditemukan dan IUCN telah memasukannya dalam daftar hewan yang terancam punah. Populasi hiu tersebut semakin menurun karena gencarnya perburuan ilegal.

5. IKAN PARI MANTA

Ikan pari manta (*Manta birostris*) adalah salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia. Lebar tubuhnya dari ujung sirip dada ke ujung sirip lainnya mencapai hampir 7 meter (kemungkinan lebih karena ada laporan yang mengatakan bahwa ada manta yang lebar tubuhnya mencapai 9,1 meter). Bobot terberat manta sendiri yang pernah diukur mencapai 3 ton. Manta dapat ditemukan di lautan tropis di seluruh dunia - kurang lebih antara 35o lintang utara hingga 35o lintang selatan. Persebarannya yang luas dan penampilannya yang unik menyebabkan ikan ini memiliki banyak nama mulai dari "manta Pasifik", "devil fish", hingga "sea devil". Di Indonesia sendiri, pari manta memiliki aneka nama lokal seperti "manta Atlantik", cawang kalung, plampangan, serta pari kerbau[2] (mungkin karena bagian tubuh mirip tanduk di kepalanya sehingga ia dianggap mirip dengan kerbau) Dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta



RESEP KITA



BAHAN-BAHAN :

Bahan untuk roti :

- Tepung terigu protein sedang $\frac{1}{2}$ kg.
- Fermipan 5 gr.
- Minyak sayur 3 sdm.
- Garam $\frac{1}{2}$ sdt.
- Gula pasir 2 sdm.
- Air 250 ml.

Bahan untuk topping :

- Saus tomat secukupnya.
- Keju mozarella secukupnya (dipotong-potong).
- Bawang bombay 2 buah (dicincang halus).
- Bila Anda suka, bisa juga menggunakan topping berikut : ikan tuna, sosis, bakso, daging asap (ham), ayam, dan lain sebagainya.

Persiapan sebelum memasak :

Siapkan wadah, lalu masukkan: tepung terigu, fermipan, gula pasir, garam dan minyak sayur, aduk dan campur sampai merata. Sambil menguleni tepung, tambahkan air sedikit

demis sedikit hingga terbentuk menjadi adonan.

Tutup wadah dengan kain, dan biarkan dulu adonan di dalamnya.

Siapkan wajan, lalu tumis bawang bombay sampai berbau harum, tambahkan topping sesuai selera Anda ke dalam tumisan.

Masukkan secukupnya saus tomat dan saus cabai. Adonan yang telah cukup lama didiamkan lalu digilas agar berbentuk pipih. Tentukan ketebalan adonan roti sesuai selera Anda. Makin tipis adonan, maka makin renyah rasanya.

Cara membuat:

- Siapkan wajan teflon, kemudian panaskan dan cairkan 1 sdm mentega.
- Letakkan adonan pizza diatas wajan, taburi dengan keju mozarella.
- Selama memasak, tutupilah wajan dengan penutupnya, agar benar-benar matang dan keju mencair dengan sempurna.

Pizza teflon siap dihidangkan.

SELAMAT MENCOBA...



Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo dalam pertemuan bersama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko



Setjen Wantannas menerima penghargaan setelah menghadiri acara Nonton Bareng Gala Premier Film Impian 1000 Pulau di CGV Blitz Grand Indonesia

Majalah CATRA menerima artikel dan berita tentang suatu kegiatan atau apa saja. Panjang tulisan maksimal 500 kata, jenis huruf Arial, ukuran huruf 12, ukuran spasi 1,5 dan jenis kertas A4. Artikel dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* dengan format *MS. Word* ke alamat redaksi Majalah CATRA. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut tanpa mengurangi maksud dari isi tulisan. Artikel yang dimuat akan mendapat imbalan. Informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Bagian Humas Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas, Jalan Medan Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.

73 Tahun
PALANG MERAH INDONESIA



SEMANGAT KEPAPHLAWANAN RELAWAN